

Menyoal Historiografi Indonesiasentris

**Bagian Pertama
dari Dua Tulisan**

Oleh: Hendra Kurniawan

APRESIASI Historiografi Indonesia yang berlangsung tanggal 5-8 Mei 2014 di Yogyakarta menetapkan tanggal 14 Desember sebagai Hari Sejarah Indonesia. Penetapan tanggal tersebut mengacu pada Seminar Sejarah Indonesia yang diselenggarakan pertama kalinya pada tanggal 14-18 Desember 1957. Tentu hal ini bukan tanpa tujuan, melalui Hari Sejarah Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap sejarah nasional yang mulai terkikis oleh semakin kentalnya aspek lokalitas sejak bergulirnya otonomi daerah.

Seminar Sejarah Indonesia tahun 1957 merupakan tonggak penting dimulainya historiografi Indonesiasentris yang sebelumnya masih berorientasi pada sudut pandang kolonial. Materi sejarah di masa itu tidak memperlihatkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Menyadari pentingnya

sejarah sebagai identitas bangsa maka penulisan Sejarah Nasional Indonesia menjadi kebutuhan mendesak. Pada masa pemerintahan Orde Baru, historiografi Sejarah Nasional Indonesia sempat mengalami politisasi yang sangat masif. Penulisan sejarah nasional saat itu dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa. Maka di masa sekarang ini diperlukan penyegaran kembali historiografi Indonesiasentris.

Persoalan Usman-Harun

Berbicara tentang historiografi Indonesiasentris, mengingatkan kita pada salah satu persoalan belum lama ini yang perlu dilihat dari kacamata sejarah. Beberapa waktu lalu muncul sikap penolakan pemerintah Singapura terkait pemberian nama kapal perang yang baru dibeli TNI dari Inggris. Kapal TNI AL itu diberi nama KRI Usman-Harun. Nama tersebut diambil dari dua orang personel Korps Komando Operasi (KKO) atau sekarang disebut

Marinir TNI AL yang gugur saat konflik akibat Konfrontasi Indonesia-Malaysia antara kurun 1962-1966.

Pada bulan Maret 1965, Sersan Usman Janatin dan Kopral Harun Said diperintahkan menyusup ke Singapura untuk melakukan sabotase terhadap kepentingan Malaysia dan Singapura. Tugas dalam rangka operasi Ganyang Malaysia ini bertujuan untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai boneka Inggris.

Ini merupakan bagian dari upaya membendung kekuatan neokolonialisme dan imperialisme (nekolim). Setelah melakukan pemboman di MacDonald House, Usman dan Harun tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Singapura.

Presiden Soeharto pernah mengajukan permohonan agar Usman dan Harun jangan dihukum mati namun

pemerintah Singapura kukuh pada keputusannya. Usman dan Harun akhirnya menjalani hukuman gantung di penjara Changi pada tanggal 17 Oktober 1968.

Jasad keduanya dikembalikan ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Melalui Keppres No. 050/TK/1968, Usman dan Harun diangkat sebagai Pahlawan Nasional.

Pada tahun 1970, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya Presiden Soeharto memberi syarat pada PM Lee untuk meletakkan karangan bunga langsung di makam Usman dan Harun. Syarat ini dipenuhi oleh PM Lee.

Semenjak itu hubungan Indonesia dengan Singapura mulai membaik. Ini dapat diartikan bahwa Singapura telah mengakui penghormatan yang diberikan oleh Indonesia kepada Usman dan Harun. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Menyoal Historiografi Indonesiasentris

Bagian Terakhir
dari Dua Tulisan

Oleh: Hendra Kurniawan

DALAM perspektif Indonesia-sentris, penggunaan nama Usman-Harun tidak perlu dipersoalkan. Ini sama dengan penggunaan nama Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, Pattimura, dan pahlawan nasional lainnya. Meskipun Belanda menganggap mereka sebagai pembereontak karena telah melawan pemerintahan Hindia Belanda, namun Belanda tidak pernah mengungkapkan keberatannya ketika nama-nama mereka diabadikan sebagai nama jalan, gedung, bandara, dan tempat penting lainnya di Indonesia.

Di negara Belanda sendiri, nama-nama gubernur jenderal yang pernah memerintah di Hindia Belanda juga banyak diabadikan untuk nama jalan maupun gedung. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), namanya dipakai

sebagai nama jalan, gedung di Amsterdam yang disebut Coengebouw, patungnya juga dibangun di Hoorn, tempat kelahirannya. Gubernur Jenderal Carel Herman Aart van der Wijck, namanya diabadikan pada sebuah kapal mewah yang tenggelam di perairan Jawa tahun 1936. Para gubernur jenderal dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara mereka. Pemerintah Indonesia tidak memprotesnya sekalipun mereka itu pimpinan kompeni yang kejam telah memeras rakyat dan menguras kekayaan bumi Indonesia.

Tentu sah-sah saja apabila Indonesia juga hendak mengabadikan nama Usman-Harun. Itu merupakan wujud pengakuan pada mereka berdua sebagai pahlawan yang telah gugur karena totalitas pengabdian

bagi bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia juga memiliki aturan, prosedur, dan penilaian sendiri untuk menganugerahi gelar pahlawan nasional yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan seseorang dihormati sebagai pahlawan atau tokoh yang berjasa besar sesuai perspektif dan kriteria mereka sendiri. Pemerintah Singapura perlu belajar untuk berjiwa besar dengan menghormati keputusan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari sikap menghargai sejarah sesuai dengan perspektif masing-masing negara.

Bercermin dari permasalahan Usman-Harun maka sangatlah penting apabila penulisan sejarah nasional perlu disegarkan. Generasi penerus bangsa ini perlu memperoleh wawasan kesejarah yang

dapat membentuk karakter kebangsaan. Jangan sampai kita menjadi miskin dalam penulisan sejarah yang akhirnya melahirkan generasi ahistoris. Sejarah perlu dihadirkan dalam perspektif Indonesiasentris yang sejati bukan untuk kepentingan penguasa.

Protes negara tetangga soal penggunaan nama Usman-Harun seharusnya dapat semakin menguatkan militansi generasi muda dalam memberi penghargaan yang tinggi terhadap pengorbanan para pahlawan bangsa. Pemahaman sejarah dari perspektif Indonesiasentris diharapkan mampu menanamkan *national consciousness* dan *Indonesian hood* guna mengokohkan kembali jati diri bangsa yang mulai terkikis. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.